

Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Polresta Surakarta Polresta Yogyakarta, Poltabes Semarang Dan Akpol

Oleh
IGG. PUTERA UTHARA *)

PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan keberhasilan Program Keluarga Berencana di lingkungan Polri, maka KB Polri harus bekerja lebih keras lagi, terutama dalam meningkatkan jumlah akseptor, memperluas pusat pengajaran dan semakin turun ke bawah dengan kelompok akseptornya. Proses alih l.elola program perlu makin dipercepat dan makin ditingkatkan dengan partisipasi aktif dari seluruh anggota Polri, Bhayangkari, Perssip Polri dan keluarganya. Salah satu jalan yang telah ditempuh oleh KB Polri adalah dengan mengadakan pendataan akseptor KB di seluruh Indonesia dengan jalan sensus. Dengan pendataan melalui sensus KB ini, dapat diketahui berapa jumlah akseptor aktif di lingkungan Polri, beserta metode apa yang dipergunakannya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pada kegiatan evaluasi program Keluarga Berencana ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat Polri di Polda Jateng dalam men-sukseskan program KB Polri dengan

cara langsung menemui sasaran di lapangan yakni ibu-ibu Bhayangkari, Polwan dan Perssip Wanita yang telah menikah di Polresta Yogyakarta, Polresta Surakarta, Poltabes Semarang dan Akpol dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang data akseptor aktif di keempat wilayah tersebut.

BAHAN DAN CARA

Bahan untuk mengadakan evaluasi program KB ini diperoleh dengan cara pengisian kwesioner oleh ibu Bhayangkari, Polwan, Perssip Wanita yang telah menikah dan berdomisili di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, Polresta Surakarta, Poltabes Semarang dan Akpol Semarang.

Pengisian kwesioner tersebut mendapat bimbingan dan supervisi langsung dari Kabagdalmedik Disdokkes Polri dan Kadisdokkes Polda Jateng beserta staf masing-masing, sehingga data kesertaan KB yang diperoleh dapat dipercaya.

HASIL YANG DICAPAI

Sasaran kegiatan evaluasi program Ke-

*) (GG. Putera Uthara : Let. Kol. Pol. Dokter Umum Kabag Dalmedik, Ses Dis Dokkes Pol.

uarga Berencana Polri di Polda Jateng adalah Polresta Surakarta, Polresta Yogyakarta dan Poltabes Semarang dan Akpol.

Jumlah anggota Bhayangkari, Polwan, Perssip, PHL yang sudah menikah di Poltabes Semarang, Polresta Surakarta, Polresta Yogyakarta dan Akpol seluruhnya adalah 2.546 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di Poltabes Semarang 938 orang
- b. Di Polresta Surakarta 653 orang
- c. Di Polresta Yogyakarta 585 orang
- d. Di Akpol 370 orang

pada waktu diadakan kegiatan tersebut, maka jumlah Bhayangkari, PNS, PHL, Polwan yang dapat diliput adalah 2.117, sedangkan jumlah seluruhnya adalah 2.546 orang, sehingga yang berhasil diliput adalah 83,22% dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di Poltabes Semarang 668 orang = 71,2%
- b. Di Polresta Surakarta 563 orang = 86,2%

- c. Di Polresta Yogyakarta 616 orang = 88,2%
- d. Di Akpol 370 orang = 100%

Ditinjau dari pada macam sampel, maka diketemukan jumlah Bintara dan Tamtama yang paling banyak yaitu sebanyak 1.634 orang ini berarti 77,2% dari pada seluruh sampel. Perssip Polri golongan I dan II terdapat 169 orang atau 7,98%. Dengan demikian, maka Tamtama, Bintara, Perssip golongan I dan II yang dipergunakan sebagai sampel adalah sebagai berikut :

- a. Di Poltabes Semarang Bintara Tamtama 603 orang atau 90,3%, Sipil golongan I dan II 18 orang atau 2,7%.
- b. Di Polresta Surakarta Bintara Tamtama 446 orang atau 79,2%, Sipil golongan I dan II 56 orang atau 9,9%.
- c. Di Polresta Yogyakarta Bintara dan Tamtama 453 orang atau 87,8% Sipil golongan I dan II 27 orang atau 5,2%.
- d. Di Akpol Bintara dan Tamtama 104 orang atau 28,1%, Pamen 93 orang atau 25,1%, Sipil golongan I dan II 68 orang atau 18,4%.



Kesatuan	Populasi	Sampel	Pangkat				Golongan				
			Pa-men	Pama	Ba	Ta	III	II	I	PHO	PHL
Poltabes Semarang	938	668	6	41	375	228	—	10	8	—	—
Polresta Surakarta	653	563	2	59	215	231	—	38	18	—	—
Polresta Yogyakarta	585	516	4	32	247	206	—	7	20	—	—
Akpol Semarang	370	370	93	68	104	28	5	25	43	—	—
Jumlah	2546	2117	105	200	941	693	5	80	89	—	—

Apabila ditinjau rata-rata umur atau 80,1% istri, maka kita dapatkan data umur c. Pada Polresta Yogyakarta 447 orang istri terbanyak berkisar antara 20 — 34 atau 86,6% tahun. Mereka ini berjumlah 1.726 d. Pada Akpol 212 orang atau 57,2% orang atau 81,5% dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada Poltabes Semarang 571 orang tapi khususnya di Akpol banyak terdapat golongan istri dengan umur berkisar antara 30 — 44 tahun yaitu sebesar 85,5% banyak 261 orang atau 70,5%.

b. Pada Polresta Surakarta 496 orang

Kesatuan	Umur Istri						
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Poltabes Semarang	12	234	226	111	55	25	5
Polresta Surakarta	14	138	250	108	29	16	8
Polresta Yogyakarta	9	177	185	85	37	20	3
Akpol Semarang	2	46	48	118	90	53	13
Jumlah	37	595	709	422	211	114	29

Jumlah PUS tercatat 2.072 orang atau 97,9% dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di Poltabes Semarang 660 orang atau 98,8%
- b. Di Polresta Surakarta 549 orang atau 97,5%
- c. Di Polresta Yogyakarta 513 orang atau 94,6%
- d. Di Akpol Semarang 350 orang atau 94,6%

dengan demikian terlihat jumlah PUS cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena usia rata-rata istri terbanyak berkisar antara 20 - 34 tahun, suatu usia yang sangat produktif untuk melahirkan.

Kesatuan	P U S	Non PUS
1. Poltabes Semarang	660	8
2. Plresta Surakarta	549	14
3. Polresta Yogyakarta	513	3
4. Akpol Semarang	350	20
Jumlah	2.072	55

Apabila diperhatikan jumlah akseptor aktif, maka kita dapatkan jumlah akseptor aktif sebanyak 1.685 orang, berarti 81,3% dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di Poltabes Semarang 515 orang atau 78%
- b. Di Polresta Surakarta 447 orang atau 81,4%
- c. Di Polresta Yogyakarta 400 orang atau 77,97%
- d. Di Akpol Semarang 323 orang atau 92,3%

Akseptor non aktif yang terdiri dari mereka yang hamil, belum punya anak, ingin anak, dan ingin anak lagi berjumlah 18,2%

Hukum Kesehatan adalah suatu bidang yang mencakup seluruh aturan hukum yang berhubungan langsung dengan bidang pemeliharaan, pelayanan kesehatan, dan penerapannya dari hukum perdata, hukum administratif serta hukum pidana dalam hubungan tersebut, ditambah pedoman-pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Sedangkan ilmu hukum dan literatur juga dapat merupakan sumber-sumber hukum disamping hukum otonom.

Kesatuan	Aktif	Non Aktif
1. Poltabes Semarang	515	145
2. Polresta Surakarta	447	102
3. Polresta Yogyakarta	400	113
4. Akpol Semarang	323	27
Jumlah	1.685	387

Apabila ditinjau dari kontrasepsi yang dipakai, maka metode kontrasepsi IUD paling banyak dipakai di ke-4 tempat sasaran. Adapun metode yang banyak dipakai adalah sebagai berikut :

- a. IUD 483 orang atau 28,7%
 b. Injeksi 408 orang atau 24,2%
 c. Pill 300 orang atau 17,8%
 d. Operasi wanita 199 orang atau 11,8%
 e. Kondom 193 orang atau 11,45%
 f. Pantang berkala 38 orang atau 2,25%
 g. Operasi pria 30 orang atau 1,78%
 h. Susuk 17 orang atau 1%
 i. VT. 7 orang atau 0,6%

Kesatuan	IUD	Pil	Kon- dom	VT Inj.	Opera- si Pria	Opera- si Wanita	Pant. Ber- kala	Susuk	Lain-lain
1. Poltabes Semarang	109	106	43	175	1	58	9	9	5
2. Polresta Surakarta	155	100	61	71	21	31	6	2	—
3. Polresta Yogyakarta	145	47	44	399	6	46	5	3	2
4. Akpol Semarang	74	47	45	63	2	64	18	3	3
Jumlah	483	300	193	7408	30	199	38	17	10

Ditinjau dari lokasi pemakaian alat kontrasepsi yang banyak dipakai, maka kita dapatkan :

- a. Di Poltabes Semarang banyak akseptor yang memakai injeksi yaitu sejumlah 175 orang atau 33,98%.
- b. Di Polresta Surakarta alat kontrasepsi yang banyak dipakai adalah IUD sejumlah 155 orang atau 34,67%.
- c. Di Polresta Jogjakarta alat yang terbanyak dipakai adalah IUD yaitu sejumlah 45 orang atau 36,25%.
- d. Di Akpol Semarang alat kontrasepsi yang terbanyak adalah IUD yaitu 74 orang atau 22,9%.

Ternyata kebanyakan akseptor memilih IUD. Hal ini disebabkan oleh karena efek sampingnya lebih rendah, resiko kegagalan lebih sedikit dan lebih dianjurkan oleh petugas keluarga Berencana Polda Jateng. Di Poltabes Semarang IUD kurang diminati dan banyak yang memakai injeksi, mungkin disebabkan karena obat untuk injeksi tersebut mudah didapat di Semarang dan mudah cara menggunakannya.

Apabila kita lihat tingkat pendidikan

Apabila kita lihat tingkat pendidikan akseptor KB, maka pendidikan SLTA adalah yang terbanyak. Jumlah yang berpendidikan SLTA adalah sebanyak 738 orang atau 43,1%. Jumlah yang berpendidikan SLTP adalah sebanyak 618 orang atau 35,88%. Adapun perincian yang pendidikan SLTA dan SLTP adalah sebagai berikut:

- a. Di Poltabes Semarang
 - SLTA 229 orang atau 44,5%
 - SLTP 207 orang atau 40,2%
- b. Di Polresta Surakarta
 - SLTA 189 orang atau 42,3%
 - SLTP 185 orang atau 41,2%
- c. Di Polresta Jogjakarta
 - SLTA 170 orang atau 42,5%
 - SLTP 132 orang atau 33,0%
- d. Di Akpol Semarang
 - SLTA 150 orang atau 46,4%
 - SLTP 94 orang atau 29,1%

Kesatuan	PT	SLTA	SLTP	SD
1. Poltabes Semarang	20	229	207	59
2. Polresta Surakarta	20	189	185	53
3. Polresta Jogjakarta	28	170	132	70
4. Akpol Semarang	94	150	50	29
Jumlah	162	738	574	211

Jumlah rata-rata anak hidup untuk seorang istri di ke-4 wilayah tersebut adalah rata-rata 2,4 anak.

Apabila kita tinjau perwilayah, maka jumlah rata-rata anak hidup untuk seorang istri bervariasi sebagai berikut:

- a. Di Poltabes Semarang rata-rata 2,3 anak.
- b. Di Polresta Surakarta rata-rata 2,3 anak.
- c. Di Polresta Yogyakarta rata-rata 2,3 anak.
- d. Di Akpol Semarang rata-rata 2,9 anak.

Di samping itu masih terdapat sejumlah istri yang mempunyai anak lebih dari 3 orang yaitu di :

- a. Polresta Surakarta 22,9%
- b. Akpol 33,8%

Sedangkan jumlah istri yang mempunyai 2 anak di :

- a. Polresta Yogyakarta terdapat 26,9%
- b. Poltabes Semarang 31,1%

Secara keseluruhan terlihat bahwa di ke-4 wilayah tersebut terdapat 25,5% istri dengan 2 anak.

Jika kita tinjau rata-rata jumlah anak hidup pada seorang istri, maka terdapat istri dengan jumlah anak :

- a. 1 ada 20,07%
- b. 2 ada 25,55%
- c. 3 ada 20,07%
- d. 0 (nol) ada 11,2%
- e. lebih dari 3 ada 23,1%.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa istri yang mempunyai anak kurang

dari 4 anak adalah 76,9%, sedangkan istri dengan anak lebih dari 3 ada 23,1%. Hal ini berarti pelaksanaan kegiatan program Keluarga Berencana dalam rangka mengurangi jumlah anak di 4 wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan.

Balita ternyata cukup banyak di 4 wilayah tersebut di atas yaitu sebanyak 1.036 anak atau 48,9%. Hal disebabkan oleh karena banyak terdapat ibu usia muda terutama yang berusia 20–34 tahun yang merupakan usia produktif untuk melahirkan anak. Oleh karena itu sasaran khusus kepada ibu usia muda ini kegiatan program Keluarga Berencana hendaknya lebih ditingkatkan.

Fasilitas Keluarga Berencana yang banyak dikunjungi untuk mendapatkan alat atau obat kontrasepsi adalah fasilitas Keluarga Berencana non Polri sebanyak 70,9%. Sedangkan fasilitas Keluarga Berencana Polri hanya dikunjungi oleh sebanyak 29,1% akseptor KB. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas Keluarga Berencana Polri kurang dimanfaatkan karenanya KB Polri perlu melaksanakan dinamisasi kegiatan pelayanan Keluarga Berencana untuk menarik akseptor sebanyak-banyaknya.

KESATUAN	JUML. ANAK HIDUP				UMUR ANAK KURANG 5 TAHUN	UMUR ANAK TERKECIL		
	1	2	3	+3		5 TH	10 TH	16TH
1. Polrestabes Semarang	147	208	135	124	365	105	43	12
2. Polresta Surakarta	98	124	109	129	266	78	80	14
3. Polresta Yogyakarta	118	139	88	111	249	73	40	8
4. Akpol Semarang	62	70	93	125	156	18	6	1
Jumlah	425	541	425	489	1.036	274	168	35

KESATUAN	RUMAH SAKIT				POLIKLINIK KB				PRAKTEK SWASTA		
	POL-RI	ABRI	PEM	SWAS-TA	POL-RI	ABRI	PEM	SWAS-TA	DOK-TEK	BI-DAN-LAIN	LAIN-LAIN
1. Poltabes Semarang	21	21	86	17	98	8	115	52	56	23	18
2. Polresta Surakarta	61	4	40	38	87	1	118	14	71	13	-
3. Polresta Jogjakarta	1	2	81	41	62	3	129	24	39	15	3
4. Akpol Semarang	61	37	11	8	100	22	15	4	26	14	26
Jumlah	144	64	218	104	347	34	377	94	192	65	47

Untuk memperoleh obat atau alat KB, maka 66,9% akseptor KB Polri tidak membayar, sedangkan 33,1% masih membayar. Hal ini menunjukkan bahwa akseptor KB Polri di wilayah ini

menginsyafi perlunya Keluarga Berencana bagi diri dan keluarganya, sehingga tidak segan-segan mengeluarkan anggaran untuk hal tersebut.

	YA	TIDAK
1. Poltabes Semarang	213	302
2. Polresta Surakarta	142	305
3. Polresta Jogjakarta	125	275
4. Akpol Semarang	78	246
Jumlah	558	1.128

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Jumlah akseptor KB di ke-4 wilayah Kepolisian yang dipergunkan sebagai sasaran kegiatan adalah sebanyak 81,3%. Ini berarti bahwa kegiatan sensus Keluarga Berencana di wilayah ini sudah mendekati sasaran program Keluarga Berencana yang ditetapkan.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana yang begitu baik ini jelas merupakan prestasi tersendiri dari bhayangkari Polda Jawa Tengah khususnya di wilayah Jogjakarta, Surakarta dan Semarang dalam keikut-sertannya menukseskan program Keluarga Berencana Polri pada khususnya dan program Keluarga Berencana Nasional pada umumnya.

c. Umur istri terbanyak berkisar antara 20–34 tahun yang merupakan usia muda, usia mana adalah sangat produktif untuk melahirkan anak. Jumlah rata-rata anak hidup adalah 2,4 anak. Bimbingan dan kewaspadaan dari para panutan masih sangat diperlukan untuk

menuju norma keluarga catur warga.

d. Para akseptor KB di ke-4 wilayah yang dikunjungi lebih memilih fasilitas Keluarga Berencana pemerintah dari pada fasilitas Keluarga Berencana Polri untuk mendapat obat atau alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan keterbatasan kegiatan, sarana, penyuluhan, petugas dan waktu untuk pelayanan Keluarga Berencana pada fasilitas kesehatan Polri.

e. 66,9% akseptor KB Polri tidak membayar bilamana yang bersangkutan mengunjungi instalasi KB, sedangkan 33,1% masih membayar, ini menunjukkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dari akseptor KB Polri di Polda Jateng cukup tinggi.

2. Saran

a. Dengan masih diketemukannya warga Polri dengan keluarga besar yaitu jumlah anak lebih 3 orang, maka

diharapkan penyuluhan tentang Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) kepada akseptor yang masih dalam usia produktif.

b. Dengan banyaknya PUS Usia muda yang boleh jadi sangat produktif, jumlah anak usia balita sangat tinggi dan jumlah anak rata-rata sudah 2,4, maka diperlukan kewaspadaan untuk pengendalian kelahiran.

c. Diharapkan pula peningkatan peran serta Bhayangkari, Polwan, pegawai negeri sipil wanita dalam rangka lebih mensukseskan program Keluarga Berencana Polri di daerah hukum Polda Jawa Tengah.

d. Untuk keberhasilan program Keluarga Berencana Polri di Polda Jateng pada waktu yang akan datang, maka pelaksanaan optimasi dan dinamisasi pelayanan Keluarga Berencana itu sendiri hendaknya dapat dilaksanakan dengan sangkil dan mangkus, baik oleh petugas Keluarga Berencana Polri, maupun oleh sarana Keluarga Berencana Polri yang ada di seluruh jajaran Polda Jateng.

PENUTUP

Demikian hasil evaluasi kegiatan program Keluarga Berencana Polri di Polresta Yogyakarta, Polresta Surakarta, Poltabes Semarang dan Akpol telah disajikan untuk menggugah kegiatan KKB dilaksanakan dengan kecepatan penuh menuju sasaran pencapaian norma "Catur Warga".

Di samping itu disampaikan pula ucapan terima kasih kepada Gubernur Akpol, Kapoltabes Semarang, Kapolwil

dan Kapolresta Yogyakarta, Kapolwil dan Kapolresta Surakarta, Kadisdokkes Polda Jateng beserta seluruh Staf dan Bagbinkes Akpol beserta Staf atas bantuan terselenggaranya kegiatan evaluasi program KB dikesatuannya masing-masing.

KEPUSTAKAAN

1. Zaenab Bakir, Chaerani Effendi, Ismail Habibun : Analisa Penggunaan Alat kontrasepsi di Indonesia, Faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan data sensus penduduk 1980, Biro Pusat Statatistik Jakarta, 1984.
2. Sulestinah I. Achmad : Suatu Gambaran ciri-ciri akseptor BKKBN di Jawa dan Bali pada tahun anggaran 1980-1981, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta, 1984.
3. Sri Murtiningsih Aditutomo : Umur perkawinan, kelahiran dan perencanaan keluarga Wanita di Jawa dan Bali, Lembaga FEUI, Jakarta, 1983.
4. Dr. Sri Pamudjo Rahardjo : Beberapa pertimbangan demografis dalam menyiapkan kebijaksanaan keluarga berencana di Indonesia, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta, 1981.

-----oOo-----

BERITA KEGIATAN

1. Penyuluhan dan evaluasi Program KB Polri di Ambon (Polda Maluku). 2. Pemberantasan Penyakit TBC di Ambon

Pada tanggal 24 Pebruari 1987 telah diselenggarakan kegiatan penyuluhan dan evaluasi program KB Polri bagi Bhayangkari, Polwan, Perssip wanita dan Staf Disdokkes Polda Maluku yang berdomisili di kota Ambon dan sekitarnya bertempat di Aula Mapolda Maluku. Penyuluhan dan evaluasi program KB tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh Disdokkes Polri Cq Bagdalmedik Disdokkes Polri bersama-sama dengan Polda Maluku Cq. Disdokkes Polda Maluku dengan sasaran untuk pendataan seberapa jauh :

a. Kemajuan yang telah dicapai dalam program KB Polri di Polda Maluku, khususnya di Ambon dan sekitarnya yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk meninjau keberhasilan program KB di Polda Maluku.

b. Pengetahuan dan partisipasi Bhayangkari, Polwan dan Perssip wanita di Polda Maluku pada umumnya dan di Ambon pada khususnya dalam bidang KKB.

Penyuluhan KB dihadiri oleh 391 orang dengan penuh perhatian. Sebelum penyuluhan diadakan pretest tentang KB dengan hasil yang sangat menggembirakan dimana $\pm 70\%$ peserta penyuluhan memperoleh nilai 60 ke atas.

Bertempat di Disdokkes Polda Maluku, Perigi lima, pada tanggal 26 sampai dengan 27 Pebruari 1987 telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap 98 orang penderita atau tersangka penderita penyakit TBC Paru hasil survey penyakit TBC Paru di Ambon dan sekitarnya oleh Disdokkes Polda Maluku. Survey ini melibatkan seluruh anggota, Perssip Polri beserta keluarganya dari Mapolda Maluku, Polres P. Ambon dan P.P. Lease di wilayah Kodya Ambon.

Hasil survey menunjukkan 98 orang penderita/tersangka penderita terdiri dari :

- a. 37 anggota/Perssip Polri
- b. 18 orang istri/Bhayangkari
- c. 33 anak-anak keluarga Polri

Setelah diadakan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap 98 orang tersebut di atas oleh Tim kesehatan dari Disdokkes Polri, maka diketemukan :

- a. Dewasa
 - 1) Dari 32 orang dengan BTA + Ro + ditemukan :
 - a) 21 orang TBC Paru
 - b) 11 orang bukan TBC Paru
 - 2) Dari 33 orang dengan BTA + Ro + ditemukan :

- a) 23 orang TBC Paru
 - b) 10 orang bukan TBC Paru
- b. Anak = dari 33 anak ditemukan:
- 1) 23 anak TBC Paru
 - 2) 10 anak bukan TBC Paru

Kepada mereka yang menderita penyakit TBC langsung diberikan paduan obat-obatan anti TBC Paru oleh Tim Disdokkes Polri.

— — — — —
*
— — — — —

**LATRAM PPGD
DI
POLDA ISTIMEWA ACEH**

Kemampuan Pertolongan Pertama merupakan kemampuan yang harus melekat pada seorang anggota Polri, khususnya bagi mereka yang berada di jalan. Sejak dahulu kemampuan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) telah masuk dalam kurikulum yang selalu ada pada setiap pendidikan dasar Polri.

Dengan berkembangnya Tehnik Pertolongan Pertama, korban yang terdolong meningkat jumlahnya, karena ternyata pertolongan yang memadai, cepat dan tepat, pada menit-menit pertama kejadian, sangat berarti bagi kelanjutan hidup korban. Resusitasi Kardio Pulmoner (Resusitasi Jantung Paru) pusat harapan kelanjutan kehidupan setelah terjadinya henti nafas dan jantung.

Pada tanggal 26 Januari sampai di negara 31 Januari 1987 Polda Istimewa Aceh telah menyelenggarakan Latram PPGD (Latihan Ketrampilan Pertolong-

an Pertama Gawat Darurat) yang diikuti oleh 46 Bintara Polri dari fungsi operasional. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri dan R.S. Zainal Abidin di Banda Aceh.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



PENINJAUAN PAMERAN DAN PERAGAN PELAYANAN POS KB IBU-IBU BHAYANGKARI POLDA MALUKU OLEH KABAG-DALMEDIK SESDISDOKKES POLRI.



SEBAGIAN PESERTA YANG MENGIKUTI CERAMAH KELUARGA BERENCANA OLEH KABAG DALMEDIK SESDISDOKKES POLRI DI AULA MAPOLDA MALUKU.